

**URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA SILO BARU KECAMATAN SILAU LAUT KABUPATEN ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SEMINAR HASIL TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum*

*(M.H)*

*pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum*

*Universitas Islam Sumatera Utara*

**Oleh :**

**IRWANSYAH PUTRA NASUTION**

**NPM : 71180123137**

**PROGAM ILMU HUKUM /HUKUM PIDANA**



**PROGRAM PASCASARJANA (S-2)**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

**URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
DESA**

(Kajian Penelitian Di Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan  
Provinsi Sumatera Utara)

**SEMINAR HASIL TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H)*

*Dalam Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

**Oleh :**

**IRWANSYAH PUTRA NASUTION**  
**NPM : 71180123137**

Medan, Februari 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. H. Yamin Lubis, S.H., M.S.C.N)

(Dr. Marzuki, S.H., M.Hum)

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis ini, judul :



## DAFTAR ISI

halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>

<b>BAB</b>	<b>I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
		A. Latar Belakang.....	1
		B. Rumusan Masalah .....	8
		C. Tujuan Penelitian .....	9
		D. Manfaat Penelitian .....	9
		E. Kerangka Teori dan Konsep .....	10
		F. Keaslian Penelitian .....	32
		G. Metode Penelitian .....	35
		1. Spesifikasi Penelitian.....	35
		2. Metode Penelitian.....	35
		3. Tempat Pengambilan Data.....	36
		4. Jenis Data .....	37
		5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	38
		6. Analisa Data .....	39
		H. Sistematika Penulisan.....	40

<b>BAB</b>	<b>II</b>	<b>KOMPONEN PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA</b>	
		A. Tindak Pidana Korupsi .....	41
		1. Pengertian tindak pidana korupsi .....	41

		2. Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi .....	43
		3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi .....	47
		4. Klasifikasi perbuatan korupsi dalam undang- undang korupsi .....	51
		5. Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi .....	64
		B. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Dana Desa .....	66
		1. Definisi Tentang Desa .....	66
		2. Pengertian Dana Desa.....	69
		3. Asas-Asas Pengelolaan Desa .....	74
		4. Alokasi Dana Desa .....	76
		5. Pembangunan Desa .....	82
		6. Korupsi Dana Desa .....	85
<b>BAB</b>	<b>III</b>	<b>IMPLEMENTASI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
		A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	87
		B. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia .....	94
		C. Peran Masyarakat .....	103
		1. Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi ..	103
		2. Landasan Peran Serta Masyarakat .....	106
		D. Gerakan Anti Korupsi .....	110
<b>BAB</b>	<b>IV</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI HAMBATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DANA DESA</b>	
		A. Modus Korupsi Dana Desa .....	114
		B. Langkah Pencegahan Korupsi Dana Desa .....	117

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ata Ujan. Andre, 2001, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Politik John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta.
- Atmaja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation, New York.
- Ganjar Laksamana, 2015, *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Aktif Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, h. 22.
- Hamzah, A, 1999, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. : Gramedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeremy Pope. 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency Internasional Indonesia, Jakarta.
- Klitgaard, Robert , dkk. , 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta.



- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M Abdul Kholik, AF. , *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum FH UII, No.26, Vol.11.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2015, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni*, Bandung.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasojo, E. 2005. *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*. Depok.
- Projodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditana, Jakarta
- Rizkan, 2020, *Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum*, Enam Media, Medan.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta:UI Press).
- Soemodihardjo, R.Dyatmiko, 2008, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Surachmin & Cahaya, Suhandi. 2013. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika , Jakarta.

Suryadi, Ni Putu Leona Laksmi, 2016, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Bali*, Skripsi, Fakultas Hukum, Unud.Zulyadi.

Shalihah, Fithriatus, 2017, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Tim Penulis KPK, 2015, *Antikorupsi*. lembaga Administrasi Negara RI, Jakarta.

Tim Penulis KPK, 2018, *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*, KPK, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah oleh Undang-undang No. 19 tahun 2019. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang  
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian  
Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan UU Nomor 31  
Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*,  
(Bogor : Politeia 1996)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20  
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam  
Pasal 2 Dan Pasal 3.,” n.d.

United Nation. (2003). *United Nations Convention Against-Corruption*  
(UNCAC).

## **B. Karya Ilmiah, Jurnal**

Arsyad, A. (2010). Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka  
Penanggulangan Korupsi Di Indonesia. *INOVATIF Jurnal Ilmu  
Hukum*, Vol.2 (No.2), pp.45-54, p.52.

Basri. (2017). Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan  
Transendental. *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 13,(No.2), pp.82-92,  
p.82.

Bunga, Marten,dkk, 2019, *Urgensi Peran Masyarakat Dalam Upaya  
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal  
Law Reform Universitas Diponegoro.

- Basri. 2017. *Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental*. Jurnal Varia Justicia, Vol. 13,(No.2), pp.82-92, p.82
- Kurniawan, T. (2009). *Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Bisnis & Birokrasi*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol.16 (No.2), pp.116-121, p117
- Putra, I Made, dkk, 2018, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali*, Jurnal Acta Comitatus.
- Putra, I Made Walesa., Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike., Putra, I Putu Rasmasi Arsha.(2018). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Studi Di Desa Cau Belayu. Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali*. Jurnal Acta Comitatus; Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 3, (No.1), p.1-16.
- Putriyana, Nia., & Puspita, Shintiya Dwi. (2014). *Tanggung Jawab Hukum Dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Arena Hukum, Vol.7, (No.3), pp.431-457, hal .435
- Ridwan, (2012). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Law Reform, Vol.8, (No.1), pp.78-97, p.79.

- Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Junral Ilmu Hukum, Vol.16,No.3.
- Santoso, Listiyono., & Meyrasyawati, Dewi. (2015). *Model Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Review Politik, Vol. 05, (No. 01), p.22-45
- Setiadi, Wicipto, 2018 , “*Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi Dan Regulasi.*” Jurnal Legislasi Indonesia 15, no. 3 , p 249–62. <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.
- Sulastri, I. (2012). *Perlunya Menanamkan Budaya Anti Korupsi Dalam Diri Anak Sejak Usia Dini*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24, (No.1), pp.98-109, hal .99
- Sumarni. (2015). *Peran Lembaga Swadaya Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi di Kota Samarinda*. eJournal Sosiologi. Universitas Mulawarman, Vol 3, (No. 2), p.111-123
- Sukmareni. (2018). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pagaruyung Law Journal, Vol.1, (No.2), pp.159-179, p.160.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2011

### **C. Internet**

- Anugrahadi, A. (2018). Laporan Masyarakat ke KPK Meningkat, OTT pun Semakin Sering. Retrieved from <https://www.liputan6.com/>

news/read/ 3469676/laporan-masyarakat-kekpk- meningkat-ott-  
pun-semakin-sering, diakses tanggal 02 januari 2023

Ardhyanasari, A. (2017). Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi.

Retrieved from

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id> diakses

tanggal 02 januari 2023

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN\\_KEADILAN\\_SOSI](http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSI)

[AL.pdf](#)

[https://news.detik.com/berita/d-3592527/kpk-ada-459-laporan-soal-](https://news.detik.com/berita/d-3592527/kpk-ada-459-laporan-soal-dana-desa)

[dana-desa.](#)

[https://news.detik.com/berita/d-3584184/kpk-soroti-4-kelemahan-dana-](https://news.detik.com/berita/d-3584184/kpk-soroti-4-kelemahan-dana-desa-yangbuka-peluang-korupsi)

[desa-yangbuka-peluang-korupsi.](#)

Matodang, M. (2012). Peran serta Masyarakat Dalam Pemberantasan

Korupsi. Retrieved from

[https://martohaprpm.blogspot.co.id/2012/11/peran-serta-](https://martohaprpm.blogspot.co.id/2012/11/peran-serta-masyarakatdalam.html?m=1)

[masyarakatdalam.html?m=1](#), diakses tanggal 25 Desember 2022